

Judul : Energi Terbarukan : Dukungan Kepemimpinan di daerah Dianggap Kurang
Tanggal : Rabu, 28 April 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

ENERGI TERBARUKAN

Dukungan Kepemimpinan di Daerah Dianggap Kurang

JAKARTA, KOMPAS – Sumber energi terbarukan telah dimanfaatkan di level komunitas lokal di beberapa daerah di Indonesia. Namun, implementasinya menghadapi banyak kendala, antara lain terkait sumber daya manusia dan permodalan. Sementara dukungan kepemimpinan di daerah dinilai belum optimal.

Tim *Kompas* yang menulis buku berjudul *Jejak dan Langkah Energi Terbarukan Indonesia* menyelidik pemanfaatan beragam energi terbarukan di beberapa daerah, yaitu Lombok di Nusa Tenggara Barat dan Sumba di Nusa Tenggara Timur. "Mandiri energi di level masyarakat sudah bisa dilakukan," kata Aris Prasetyo, Ketua Tim Penulis, dalam diskusi virtual yang digelar harian *Kompas*, Selasa (27/4/2021).

Diskusi dihadiri beberapa narasumber, yakni Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, dan anggota Dewan Energi Nasional, Satya Widya Yudha.

Di Sumba, beberapa kelompok masyarakat sudah memanfaatkan energi dari pembangkit tenaga surya, mikro hidro, dan bayu. Masyarakat Desa Kamanggih yang dibantu lembaga donor Yayasan Hivos, misalnya, sudah mandiri listrik berkat pembangkit listrik tenaga mikro hidro serta mengandalkan biogas dari kotoran ternak babi dan sapi untuk memasak.

Di Lombok, masyarakat yang dibantu Yayasan Rumah Energi menggunakan biogas dari kotoran sapi. Namun, implementasinya menghadapi beberapa

kendala. Masyarakat di Kecamatan Narmada, Lombok, yang memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air, misalnya, sempat protes ke pemerintah karena tidak bisa menikmati subsidi listrik selama pandemi.

Kurangnya tenaga terampil juga menjadi penghambat. "Pemimpin perlu campur tangan untuk masalah SDM (sumber daya manusia) dan permodalan ini," kata Aris.

Menurut Satya Widya Yudha, saat ini sudah 20 provinsi mengeluarkan peraturan daerah (perda) Rencana Umum Energi Daerah (RUED). RUED merupakan turunan dari Rencana Umum Energi Nasional yang menjadi acuan daerah untuk menjamin ketahanan energi hingga tahun 2050.

"Keluarnya perda RUED ini otomatis melibatkan pemerin-

tah provinsi dan DPRD. Namun, banyak keluhan bahwa dinas-dinas ESDM (energi dan sumber daya mineral) digabung dengan dinas lain, seperti dinas pendidikan, bahkan dinas olahraga, karena ESDM tidak dilihat sebagai hal penting," ujarnya.

Transisi energi di daerah juga belum banyak didukung anggaran daerah yang memadai. Padahal, daerah memainkan peran penting dalam mempercepat peningkatan bauran energi terbarukan.

Selain problem kepemimpinan, nilai keekonomian jadi faktor yang menyebabkan ekosistem energi terbarukan sulit terbentuk. Harga satuan energi terbarukan yang lebih tinggi daripada harga listrik dari batubara, kata Satya, jadi kendala.

Hal itu juga diakui Fabby Tumiwa. Dia menyarankan pe-

merintah mengurangi kebijakan yang berpihak pada energi fosil. "Pemerintah perlu membangun ekosistem agar penetrasi energi terbarukan cepat terjadi. Ini termasuk dengan tidak lagi membangun PLTU setelah 2050," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah perlu merencanakan implikasi percepatan transisi energi terbarukan ini terhadap daerah penghasil batubara. Perencanaan ini diharapkan terjawab oleh Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan (EBT) yang masih dalam bentuk rancangan di DPR.

"Kami menerima masukan dari berbagai pihak. Mudah-mudahan UU EBT mempertegas komitmen kita dan memberi kepastian akan perkembangan EBT," kata Sugeng

(ERK)